



::REKAPITULASI PILWALI KOTA YOGYAKARTA

KPU Akhirnya Buka Kotak Surat Suara Rusak TPS 04 Kotabaru

YOGYAKARTA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta akhirnya memutuskan membukakotak surat suara yang berisi surat suara tidak sah pada hari kedua proses rekapitulasi suara Pilwali Yogyakarta 2017 kemarin. Pembukaan kotak suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kotabaru Kecamatan Gondokusuman itu atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Yogyakarta.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyo mengatakan, pembukaan kotak suara bukan sebagai bentuk penghitungan ulang surat suara. "Se-suai Pasal 67 PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No 10/2015, penghitungan suara ulang hanya bisa dilakukan PPS atau PPK dan waktunya pada 15 Februari lalu. Kami KPU tak memiliki kewenangan menghitung ulang, ini hanya menjalankan rekomendasi panwas," ungkap Wawan, kemarin sore.

Ke Hal 11

((dari Hal 1

Kotak suara yang dibuka berisi 18 surat suara tidak sah. Mayoritas karena dicoblos di dua gambar paslon, Imam Priyono-Achmad Fadli dan Haryadi-Suyuti-Heroe Poerwadi, serta ada dua surat suara yang dicoblos dengan lubang besar. Oleh KPPS dan para saksi kedua paslon di tingkat TPS, dua surat suara berlubang besar dinyatakan tidak sah. Hal itu karena melihat diameter lubang coblosan berbeda, yaitu agak besar dan berbeda dengan surat suara lain yang coblosannya kecil. "Karena dicoblos diduga tak pakai alat yang disediakan sehingga KPPS beserta saksi sepat tak sahkan surat suara tersebut," kata Wawan yang menjelaskan ulang alasan KPPS.

Ketua Panwas Kota Yogyakarta Agus Muhammad Yasin mengatakan, pembukaan kotak suara atas rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman berdasarkan Undang-Undang

(UU) No 1/2015. "Ada keberatan di tingkat kecamatan yang masih berlanjut di tingkat kota. Jadi kami rekomendasikan dibuka," ujarnya.

Agus juga menekankan pembukaan kotak suara ini bukan sebagai bentuk penghitungan ulang surat suara. "Dari PPK Gondokusuman, hanya TPS 04 Kotagede yang direkomendasikan dibuka," katanya.

Sementara saksi dari paslon Imam-Fadli, Fokki Ardiyanto, mengajukan keberatan dua surat suara berlubang besar dinyatakan tidak sah. "Apakah KPPS melihat surat suara dicoblos tak pakai alat yang disediakan? Apakah KPPS sediakan alat coblos lain? Kami anggap dua surat suara itu tidak sah akibat human error, kami keberatan jika dinyatakan tidak sah," ucapnya.

Diketahui surat suara itu berlubang di gambar paslon Imam-Fadli. Namun, pembukaan kotak suara tersebut mendapat penolakan dari saksi kubupaslon Haryadi-Heroe. "Jelas tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi di TPS 04 Kotabaru. Dibukanya (kotak suara) TPS ini cukup janggal dan menyalahi aturan. Menurut kami, KPU tidak konsisten," kata Nurcahyo Nugroho, saksi paslon Haryadi-Heroe yang juga menuliskan nota keberatan.

Bahkan saat itu juga Ketua KPPS TPS 04 Kotabaru, Hariyanto, turut dihadirkan guna memberikan penjelasan. Saat itu dijelaskannya, karena bentuk coblosan berbeda, maka pihaknya meminta saksi dari paslon 1 maupun 2 serta pengawas TPS. Kemudian disepakati surat suara tidak sah karena diduga dicoblos menggunakan alat selain paku.

Pada hari kedua proses rekapitulasi kemarin, hingga pukul 18.00 WIB, KPU baru merampungkan rekapitulasi tiga kecamatan, yaitu Gondomanan, Gondokusuman, dan Pakualaman. Sementara untuk proses rekapitulasi pada hari pertama pada Rabu (22/2) lalu berjalan tak kalah alot. Adu argumen mewarnai forum rapat yang dibuka pukul 10.00 WIB dan baru berakhir pukul 02.00 WIB (Kamis dini hari).

Saksi paslon Imam-Fadli tercatat mengajukan sedikitnya lima catatan keberatan yang dituangkan melalui form catatan keberatan dan catatan kejadian khusus. Catatan di antaranya mempertanyakan soal undang-an bagi saksi paslon di TPS, informasi mengenai jumlah saksi di TPS, jalur komunikasi PPK dengan saksi paslon, bukti dokumentasi serah terima undangan memilih (C6), dan munculnya jumlah suara berasal dari pemilihan kategori DPPH dan DPTB.

Sementara saksi paslon Haryadi-Heroe tidak menunjukkan ada sikap keberatan. Mereka menerima hasil rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat PPK dan tingkat KPU. "Kami sejak awal berkomitmen menjun-

3

USUL Segera Untuk Dikeluarkan

jung aturan, menjalankannya dengan santun, serta membangun kebersamaan," kata Koordinator Saksi Paslon Haryadi-Heroe, Nurcahyo Nugroho.

Terkait surat suara yang tidak sah, dia mengatakan, itu menunjukkan sikap politik pemilih dengan mencoblos keduanya. Adajugamasukkategoritidak sah karena ketidaktahuan. "Itu semua fenomena yang biasa terjadi, bukan hal baru. Harusnya kita menghormati dan menghargai sikap politik masyarakat," ujarnya.

Selama kurun waktu 16 jam tersebut, KPU berhasil merekapitulasi suara dari lima kecamatan atau PPK, yaitu Kecamatan Mantri Jeron, Mergangsan, Kotagede, Danurejan, dan Wirobrajan. Rekapitulasi hari pertama juga diwarnai membuka surat suara rusak dari tiga TPS di Danurejan atas permintaan saksi paslon Imam-Fadli dan direkomendasi panwas.

Namun menurut KPU, surat suara rusak tidak memengaruhi perolehan suara paslon karena tidak dimasukkan dalam kotak suara di TPS. Surat suara rusak diakibatkan noda tinta, kertas berkerut, dan rusak karena pemilih menyatakan keliru mencoblos dan meminta ulang surat suara yang sesuai aturan memang diperbolehkan. Syaratnya hanya satu kali bagi satu pemilih.

Jangan Anarkis

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X ikut mengomentari aksi demonstrasi hasil Pilwali Kota Yogyakarta yang berkepanjangan oleh kubu Imam-Fadli. Sultan mengungkapkan, polemik hasil pilwali karena paslon memilih menempuh jalur hukum merupakan hak warga negara.

Hal tersebut sah-sah saja dilakukan selama bersangkutan memiliki alasan rasional dan memungkinkan untuk didialogkan. "Ruang hukumnya juga

dibuka, silakan saja," ujarnya.

Hanya Keraton Yogyakarta ini berpesan agar aksi protes yang dilakukan tidak dibarengi anarkisme. Hal tersebut akan merugikan warga lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan polemik pilwali. "Mau dibawa ke (proses) hukum juga silakan. Yang penting tidak ada anarki," katanya.

Menurut Sultan, suasana yang membuat situasi di Kota Yogyakarta menjadi kurang kondusif akan menimbulkan efek demokrasi. Mobilisasi massa untuk ikut aksi juga hal biasa. "Mau menyampaikan aspirasi orang satu, orang sepuluh, orang seribu, silakan. Tapi jangan merusak," katanya mengingatkan.

Sultan juga mengimbau agar masing-masing pihak tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kegaduhan tidak perlu. "Lebih baik tertib, kan begitu, jadi nggak ada masalah," ucap sultan.

● **ristu hanafi/
ridwan anshori**



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005